



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 99 /KPTS/BAPPEDA/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2019-2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk penetapan rencana kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023

Visi : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

- Misi :
1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan;
  2. Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
  3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
  4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
  5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif Berbasis Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Ekonomi Inklusif</li> <li>- Nilai Sistem Inovasi Daerah (SIDa)</li> <li>- Nilai Ekosistem Inovasi</li> </ul>	1.1 Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)	1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100 \%$ <p>Ket:                      t+1 : tahun pengamatan PDRB                      t : tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				1.1.2 Pengeluaran Per Kapita	$\frac{40\% \text{ Penduduk terendah} + 40\% \text{ penduduk menengah} + 20\% \text{ penduduk terkaya}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				1.1.3 PDRB per Kapita (ADHB)	$\frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				1.1.4 Rasio Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Ket                      Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i                      Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:                      G &lt; 0,3 : ketimpangan rendah                      0,3 ≤ G ≤ 0,5 : ketimpangan sedang                      G &gt; 0,5 : ketimpangan tinggi</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Sosial
				1.1.5 Inflasi	$\frac{[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t)] - 1}{t} - 1$ <p>Ket:                      ΔInf : perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya                      t : adalah periode pengamatan perubahan nilai</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Ket:                      Info : nilai inflasi pada tahun n                      Inf(n+1) : nilai pada 1 tahun berikutnya                      n : tahun ...</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Biro Perekonomian,
			1.2 Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	1.2.1 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	$\frac{PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan}_{(t+1)} - PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan}_{(t)}}{PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan}_{(t)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perindustrian
				1.2.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	$\frac{PDRB \text{ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran}_{(t+1)} - PDRB \text{ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran}_{(t)}}{PDRB \text{ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran}_{(t)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perdagangan
				1.2.3 Realisasi PMA	Jumlah realisasi PMA berdasarkan LKPM  "Nilai Investasi ("n") - Nilai Investasi (n-1) / "Nilai Investasi (n-1)" X 100%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				1.2.4 Realisasi PMDN	Jumlah realisasi PMDN berdasarkan LKPM  "Nilai Investasi ("n") - Nilai Investasi (n-1) / "Nilai Investasi (n-1)" X 100%		
				1.2.5 Neraca Perdagangan	Nilai Ekspor (\$) - Nilai Impor (\$)	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perdagangan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			1.3 Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)	1.3.1 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian}_{(t+1)} - \text{PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian}_{(t)}}{\text{PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian}_{(t)}} \times 100 \%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Dinas Perkebunan				
				1.3.2 Nilai Tukar Petani (NTP)	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$			Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
				1.3.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100$					Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1.3.4 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	$\frac{\text{Indeks yang diterima pembudidaya ikan}}{\text{Indeks yang dibayar pembudidaya ikan}} \times 100$						
			1.4 Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)	1.4.1 Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Sosial				
				1.4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$			Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			1.5 Meningkatkan Akses Energi (Maju Akses Energi)	1.5.1 Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	$\frac{\text{Jumlah Desa yang sudah berlistrik di Sumatera Selatan}}{\text{Jumlah Desa se Sumatera Selatan}} \times 100\%$	Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)	2.1.1 Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan				
			2.2 Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)	2.2.1 Angka Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.			Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pendidikan		
				2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$					Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> <li>- Indeks Pembangunan Gender (IPG)</li> </ul>	3.1 Meningkatkan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)	3.1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 [(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$ <p> <math>X_{ede(1)}</math> : <math>X_{ede}</math>: untuk harapan hidup  <math>X_{ede(2)}</math> : <math>X_{ede}</math>: untuk harapan pendidikan  <math>I_{(inc-dis)}</math> : <math>X_{ede}</math>: indeks distribusi pendapatan                 </p>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				3.1.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = 1/3 [I(inc-dis) + I(DM) + I(par)]$ <p> <math>I(inc-dis)</math> : Indeks Distribusi Pendapatan  <math>I(DM)</math> : Indeks Pengambilan Keputusan  <math>I(par)</math> : Indeks Keterwakilan di Parlemen                 </p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan		
				3.1.3 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ <p>                     Ket:  <math>IPA</math> : Indeks Perlindungan Anak  <math>W_j</math> : Bobot klaster ke-j  <math>Indeks K_j</math> : nilai indeks klaster ke-j                 </p>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	4.1 Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	4.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata = Nilai IKM Seluruh PD / Jumlah PD	Biro Organisasi	Biro Organisasi	
				4.2 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	4.2.1 Nilai SAKIP	Penilaian yang di keluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI terhadap SAKIP Provinsi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Biro Organisasi
					4.2.2 Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan daerah	Badan Pemeriksa Keuangan RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				4.3 Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)	4.3.1 Indeks Integritas Daerah	Nilai hasil survey yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Inspektorat

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>- Persentase Satuan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU</li> <li>- Rata-rata Waktu tempuh Jalan Provinsi</li> <li>- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>	5.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)	5.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Perhitungan persentase rata-rata kualitas air, kualitas udara ambien dan tutupan hutan	Data Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai, Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara, Data Keg. Proper, Dok IKPLHD serta Data Tutupan Lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan
			5.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)	5.2.1 Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak	$\frac{\text{jumlah sambungan perpipaan dan non perpipaan}}{\text{jumlah penduduk kabupaten/kota}} \times 100\%$	Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				5.2.2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki akses sistem air limbah layak}}{\text{jumlah total rumah tangga}} \times 100\%$	Rekapitulasi data kondisi jalan provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
				5.2.3 Persentase Kondisi Jalan Mantap	$\frac{\text{jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan Provinsi}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			5.2.4 Presentase Akses Internet	$\frac{\text{jumlah wilayah yang difasilitasi akses internet}}{\text{wilayah yang membutuhkan akses internet}} \times 100\%$			
6.	Terwujudnya Masyarakat Madani	- Indeks Demokrasi Indonesia	6.1 Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	6.1.1 Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik ( <i>Zero Conflict</i> )	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota tanpa konflik}}{\text{jumlah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan}} \times 100\%$	Biro Pemerintahan, TNI, POLRI, Badan Pertanahan Nasional dan SATPOL PP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah melalui Seni, Budaya, dan Religi	- Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	7.1 Meningkatkan Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)	7.1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara	Realisasi Wisatawan Mancanegara	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				7.1.2 Jumlah Wisatawan Nusantara	Realisasi Wisatawan Nusantara		
				7.1.3 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Realisasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Badan Pelestarian Nilai Budaya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota	
8.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	- Peringkat Pembangunan Pemuda - Indeks Pembangunan Pemuda	8.1 Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)	8.1.1 Jumlah Atlet Berprestasi	Realisasi Atlet yang berprestasi	Data Atlet Berprestasi yang mengikuti Kejuaraan PON dan PEPARNAS	Dinas Pemuda dan Olahraga
				8.1.2 Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Realisasi Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Agregasi Pemuda berprestasi Nasional dan Internasional pada kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU